

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,
PEMAHAMAN AKUNTANSI, KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN,
DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi)**

Silvi Oktaviani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun
Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: Silvioktaviani22@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research: (1) The effect of Application of Local Government Accounting System To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (2) Understanding of Accounting To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (3) compliance with laws and regulations To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency; (4) Work Motivation To the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency. This research is descriptive by using quantitative data analysis with causal research design. Data analysis was done by using multiple linear regression method with the help of SPSS version 23 software. In this research uisnh 4 independent variables namely The effect of Application of Local Government Accounting System (X_1), Understanding of Accounting (X_2), compliance with laws and regulations (X_3), Work Motivation (X_4), and performance accountability (Y) as its dependent variable. The results of this study indicate that the Application of Local Government Accounting System has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.281. Understanding of Accounting has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.217. Unlike the utilization of compliance with laws and regulations has no significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.092. But Work Motivation has a positive and significant impact on the Accountability Performance of Local Government Kuantan Singingi regency of 0.166.

Keyword: Application of Local Government Accounting System, Understanding of Accounting, compliance with laws and regulations, Work Motivation, and performance accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (2) Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (3) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; (4) Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 23. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1), Pemahaman Akuntansi (X_2), Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X_3), Motivasi Kerja (X_4), dan Akuntabilitas Kinerja (Y) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.281. Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.217. Berbeda dengan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.092. Tetapi Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0.166.

Kata Kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Motivasi Kerja, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

Fenomena mengenai akuntabilitas kinerja sangat menarik untuk dikaji lebih jauh karena di Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Di samping itu, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, terarah, dan terencana adalah dengan menyiapkan suatu sistem pengendalian manajemen yang baik. Terwujudnya prestasi kerja yang baik dalam suatu organisasi tidak lepas dari kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian berbagai aktivitas yang dimiliki dalam rangka memperoleh target perusahaan (Mufida, 2011).

Menurut Baswir (2000:7) Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapatkan penilaian opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan badan pemeriksaan keuangan pada tahun 2015 sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan sebanyak 280 pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan salah satunya adalah Komisi Pemberantas Korupsi (www.kompas.com).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, mulai dari tahun 2011-2017 yaitu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun ada kelemahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan tidak bertanggungjawabnya terhadap laporan keuangan dan belum diterapkan sistem akuntansi pemerintah daerah. (www.bpk.go.id). Sebagai contoh pada tahun 2014, badan pemeriksaan keuangan menemukan permasalahan terkait tidak bertanggungjawabnya terhadap penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) pengendalian dan manajemen kas belum optimal serta realisasi belanja atas iuran asuransi kesehatan tidak menggunakan mekanisme surat pencairan dana (SP2D) dan (2) penyusunan barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen administrasi yang memadai. Badan Pemeriksaan Keuangan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

pengelolaan laporan keuangan daerah, diantaranya: (1) uang persediaan per 31 Desember 2014 terlambat disetor dan (2) belanja perjalanan dinas luar daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) tidak dilaksanakan (<http://pekanbaru.bpk.co.id>). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga masih perlunya pembenahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan disusun sesuai standar yang telah diterapkan.

Menurut peneliti Sumiati (2012) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian Lumenta, dkk (2016), tentang pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan (*expand replicant*) dari penelitian Hasibuan (2017). Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Hasibuan (2017) memakai tiga variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan, sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu motivasi kerja dengan memakai obyek yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya terkait dengan variabel penelitian dan obyek penelitian. Penelitian pada peneliti ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yaitu, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, menurut Mahmudi (2011:223) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

2.1.2 Definisi Pemahaman Akuntansi

Menurut Riko (2006:75) pemahaman akuntansi merupakan suatu proses pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

2.1.3 Definisi Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Dengan adanya keataan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007, menyimpulkan setiap pemerintah daerah diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan arus kas. Kenyataan pemerintah cenderung tidak dapat mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

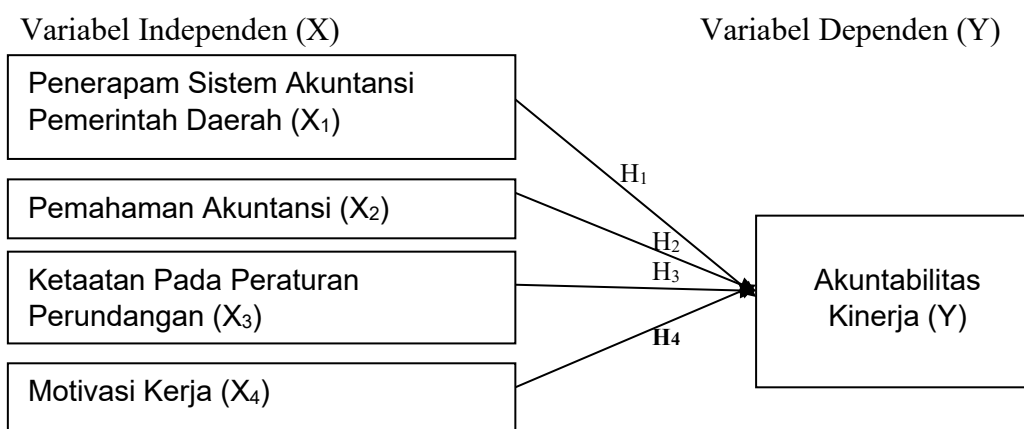
2.1.4 Definisi Motivasi Kerja

Menurut Danang (2013:191) motivasi adalah suatu perangsang, keinginan, daya gerak dan kemauan bekerja seseorang setiap motif mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Hasibuan (2012:193) motivasi kerja merupakan suatu modal menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggungjawab. Kebijakan organisasi atau perusahaan dalam memberikan motivasi erat kaitannya dengan prestasi kerja yang akan dicapai. Prestasi kerja karyawan memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan cara pemberian motivasi setiap organisasi atau perusahaan harus benar-benar mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Melihat pentingnya pengaruh motivasi, maka sepatutnya motivasi diberikan oleh setiap organisasi pemerintahan atau swasta.

2.1.5 Definisi Akuntabilitas Kinerja

Menurut Bastian (2001:33) Motivasi kerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H_2 = Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H_3 = Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H_4 = Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut (Emzir, 2010:119). Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel bebas/independen (variabel yang mempengaruhi) dan (variabel yang dipengaruhi) adalah variabel terikat/dependen (Sugiono, 2014:93). Dalam penelitian ini akan menggambarkan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian hipotesis-hipotesis dan teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (Efferin, 2008:47).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:230). Adapun isi kuesioner sebagai instrument penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas:
 - a) Profil responden, meliputi nama, nama instansi, jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir.
 - b) Daftar pertanyaan, meliputi pertanyaan mengenai indikator variabel penelitian. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka dan tertutup (Sugiyono, 2014:232).
2. Studi Kepustakaan
Penelitian dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti pada buku ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh landasan teoritis untuk melakukan pembahasan.
3. Mengakses data melalui website dan situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Uji Validitas

Ghozali (2013:52-53) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi melalui uji asumsi klasik,

3.3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja

α = Konstanta

X₁ = Variabel independen 1 (Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah)

X₂ = Variabel independen 2 (Pemahaman Akuntansi)

X₃ = Variabel independen 3 (Ketaatan pada Peraturan Perundangan)

X₄ = Variabel independen 4 (Motivasi Kerja)

$\beta_{(1,2,3,4)}$ = Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

e = Error Term, yaitu kesalahan regresi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan yaitu diterima. Hubungan yang signifikan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dan apabila pemerintah menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada maka akan berdampak baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa t hitung > t tabel yaitu 3.234 > 1.993 dengan signifikansi sebesar 0.002 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan adalah H₀ ditolak dan H₁ diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan oleh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan di masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah semakin baik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga sudah semakin meningkat. Dilihat dari tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah secara umum yaitu untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan atau kegagalan kinerja. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang pertama mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2012) bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Kabupaten Siak. Penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD pemerintah Aceh. Oleh karena itu, jika sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan dengan benar maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang dibuat.

4.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hubungan ini menunjukkan semakin baik pemahaman akuntansi disuatu pemerintah daerah maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang dihasilkan, karena pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.999 > 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.004 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang diterapkan di masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka semakin baik dan berdampak positif pada akuntabilitas kinerja yang dihasilkannya. Dilihat dari kebutuhan sumber daya manusia yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang pertama mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2010) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Apriyani (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada pemerintah Kota Yogyakarta.

4.3 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketaatan pada peraturan perundangan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Hal ini menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.208 < 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.231 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_3 ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan para pegawai dalam menjalankan aktivitas tidak mengutamakan prinsip efisiensi dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan rendahnya tingkat ketaatan pada peraturan perundangan maka tidak semakin meningkatnya

akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lumenta, dkk (2016) ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian S. Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pekanbaru.

4.4 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi kerja pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hubungan yang signifikan menunjukkan bahwa motivasi kerja akan menghasilkan akuntabilitas kinerja yang baik.

Berdasarkan data dari nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaannya yaitu: bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.049 > 1.993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.044 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, motivasi kerja menjadi hal yang sangat penting diterapkan di masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimana motivasi kerja yang tinggi juga dapat meningkatkan kinerja individu dan semakin meningkat akuntabilitas kinerja serta berdampak positif terhadap masing-masing instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Zirman, dkk (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pekanbaru. Menurut penelitian Febriani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Kota Yogyakarta.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.281. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.
2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.217. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pemahaman akuntansi dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.
3. Ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.092.
4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0.166. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat motivasi kerja dalam

mejalankan penugasan profesionalnya makan akan semakin baik akuntabilitas kinerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur saya peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan dar Allah SWT dan dukungan, bimbingan dan bantuan dari keluarga, sahabat-sahabat serta pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril dan spiritual sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Penasehat Akademis peneliti yang telah memberi arahan dan semangat selama perkualihan.
2. Bapak Zul Ammar., SE., ME. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis., SE., M.Si. Selaku ketua program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada peneliti.
4. Ibu Diskhamarzeweny., SE., MM. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan membantu untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu yang berada pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai responden, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk seluruh teman seperjuangan angkatan 2015 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, terkhusus teman-teman sekelas Akuntansi A, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk keluarga peneliti, ayahanda Hendra Muchtar dan Ibunda Elfita Adnan, Rian Saputra (Abang), Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya selama ini, terutama do'a dan dukungannya selama ini yang tiada henti baik secara moril dan materil demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.
9. Serta yang tidak terlupakan H. Helfi Muchtar (Oom) yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Terimakasih telah membantu selama proses perkuliahan dan telah membimbing selama diperantauan baik secara moril dan material.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Danang, Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2012. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: CAPS.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Hasibuan, Janny, Rahmi. 2017. *Pengaruh Perapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah Pada SKPD Padang Lawas*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 6. No 3.
- Lumenta, A.L, J.Morasa, L.Mawikere, 2016. *Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten minahasa selatan*”, *Jurnal EMBA*, Vol.4, No. 3.
- Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Pekbis*, Vol 3. No 3.
- Sumiati. 2012. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Siak*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2. No 2.
- Soleman, R. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Disertasi. Unpad.
- Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi, 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 18, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP)*.
- LAN, 2003. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pelaksanaan tanggungjawab dan pengelolaan keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya*.

Website

<http://www.bpk.go.id>. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) semester I Tahun 2017*.

Diakses 15 November 2018.

<http://www.kompas.com>. Diakses 20 November 2018.

<http://pekanbaru.bpk.co.id>. Diakses 20 November 2018.